MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS

Nomor : 512/DJMT/ST.KP7.1/VI/2026

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan wawasan bagi Hakim di bidang teknis yudisial maka perlu dilakukan Bimtek Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP di Lingkungan Peradilan Militer.

Dasar : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 493/DJMT/SK.DL1.10/VI/2026 tanggal 2 Juni 2026 tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Narasumber, Moderator, Panitia dan Peserta Bimbingan Teknis (Hakim) di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2026.

Memberi Tugas

Kepada :

1. Edi Wuryanto, S.I.P., C.Fr.A., Marsekal Pertama TNI, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer;
2. Darmaji, S.H./ 2910114190870, Letnan Kolonel Cpm, Kasi Peningkatan Mutu Panitera dan Juru Sita Ditbinganiminmil;
3. Lamtur Pandapotan Simanullang, S.E., M.M./ 197411132009121001, Pembina (IV/a), Kasi Peningkatan Mutu Hakim Ditbinganisminmil;
4. Dr. Putra Nova Aryanto Subandi, S.H., M.H./ 11100007401185, Mayor Chk., Hakim Yustisial;
5. Wiwit Andi Hartanti, A.Md./ 198406042011012014, Penata (III/c), Kasi Evaluasi dan Rasionalisasi Ditbinganisminmil;
6. Yudha Ade Saputra, S.H., M.H./ 21070380240886, Sersan Mayor, Klerek - Pengolah Data dan Informasi;
7. Anom Satria Yudhistira/ 21130129301192, Sersan Kepala, Klerek - Pengolah Data dan Informasi;
8. Cresto Himawan Tondang, S.T./ 200102232025061006, Penata Muda (III/a), Klerek - Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi.

Untuk : Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Hakim) di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2026 bertempat di kota Malang, Jawa Timur pada tanggal 14 s.d. 16 Juni 2026;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Juni 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI

YUWONO AGUNG NUGROHO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.